

Analisis Efektivitas Anggaran pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017 – 2019

Sahroni¹, Tuswoyo^{2*}

^{1,2} Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut STIAM, Jakarta Indonesia

E-mail : boyroni50@gmail.com¹. tuswoyoadmojo@yahoo.co.id²

* corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords

Analyze,
effectiveness,
budget

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze budget effectiveness at the National Unity and Politics Agency or Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) of Central Jakarta in 2017-2019. This research uses qualitative approach. Data is collected by using interview and analyzed by using three concurrent flows of activity; data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. In supporting good public governance, efforts were made to increase budget effectiveness. The efforts show good result, budget management is quite effective with difference in budget absorption achievement throughout 2017-2019 as seen in the treasurer accountability report on budget expenditure in 2017-2019. In the report, on budget execution, there is difference in absorption achievement each year which can be caused by human resource, office facility and infrastructure, unpredictable activity such as cipta kondisi, change in money supply allocation every year, different price in planning and execution, no regulation on participant's pocket money, reducing forum member, shift in activity implementation, no KDO asset mutation from SKPD, decreasing meeting intensity and activity efficiency. Internal and external obstacles in the budget execution become challenge in service development of Kesbangpol Agency of Central Jakarta. Arranged efforts are put into strategic planning of Kesbangpol Agency of DKI Jakarta to minimize obstacles in the next period.

PENDAHULUAN

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unit kerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kota Administrasi. Suku Badan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta secara operasional dikoordinasikan oleh walikota. Suku Badan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dan demokrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka salah satunya menyelenggarakan fungsi yaitu menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat. Renstra Suku Badan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Suku Badan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Pengelolaan anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi dan transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengeluaran, maka Suku

Badan harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah disusun secara umum dan dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, dan bersih sebagai aparatur pemerintah.

Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran penting dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik, menuntut setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya *good public dan good governance*.

Fenomena permasalahan yang peneliti temukan berdasarkan observasi yang dilakukan yaitu berkaitan dengan Efektivitas Anggaran pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu terkait anggaran berbasis kinerja yang dimana fokus permasalahan pada laporan realisasi anggaran belanja dan capaian kinerja Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun anggaran 2017-2019, yaitu adanya permasalahan dalam tahap implementasi anggaran belanja langsung dengan rincian program kegiatan yang telah dilaksanakan masih menimbulkan beberapa permasalahan terkait target dan realisasi anggaran yang diduga masih belum efektif dikarenakan terjadi fluktuasi anggaran dan realisasi tidak mencapai target anggaran pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat. Permasalahan ini diperkuat dengan data Laporan dibawah ini.

Tabel 1.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat

Tahun	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
2017	1.710.783.004	430.754.589	25,18
2018	3.400.824.739	407.462.797	11,98
2019	5.694.856.215	142.751.990	2,51

Sumber: Bendahara Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat

Dari tabel tersebut diketahui bahwa capaian serapan anggaran di setiap tahun mengalami kenaikan atau penurunan sisa anggaran. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh: lemahnya perencanaan anggaran, lemahnya proses pembahasan anggaran, lambatnya proses tender. Hal tersebut juga disebabkan karena anggaran yang dibuat per tahun, sehingga untuk mengeksekusi dan menyelesaikan program berkualitas yang membutuhkan waktu lebih panjang menjadi tertunda bahkan proyek gagal dieksekusi karena terkendala waktu yang tidak memungkinkan dan pada akhirnya menurunkan capaian serapan anggaran.

KAJIAN PUSTAKA

Administrasi

Menurut Soewarno Handayani (2006: 2):

“administrasi dalam arti sempit meliputi kegiatan catat-mencatat, surat- menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.”

Menurut Sondang P. Siagian (2014:3) bahwa:

“Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Administrasi Publik

Menurut Amin Ibrahim (2008: 15) :

"Administasi Publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara".

Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus dalam Harbani Pasolong (2012: 4), mendefinisikan administrasi publik, adalah:

- 1) Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik,
- 2) Koordinasi usaha-usaha perseorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- 3) Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya. Wiratna, (2015:1)

Siregar (2017:3) berpendapat akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Karena organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintahan, maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam Mardiasmo (2009:2) menyatakan akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi masa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Konsep Anggaran

Indra Bastian (2009: 191) menjelaskan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.

Deddi dan Ayuningtyas (2010: 48) menjelaskan bahwa anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya harus melakukan perencanaan yang baik supaya tujuan perusahaan yang ditetapkan dapat tercapai. Salah satu alat yang digunakan dalam perencanaan adalah anggaran, dimana anggaran ini berisi tentang rencana kegiatan yang dilaksanakan serta berisi tujuan yang hendak dicapai dalam satu periode tertentu. Mardiasmo, (2009:61), mendefinisikan anggaran merupakan pernyataan etimasi kinerja yang hendak dicapainya selama satu periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Definisi lain yang dikemukakan oleh M. Marsono pada bukunya "Tata Usaha Perbendaharaan Republik Indonesia" dalam Halim dan Iqbal (2012:138) memberikan definisi bahwa anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara pada suatu masa depan, dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut.

Jadi, berdasarkan teori-teori diatas anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial yang meliputi usulan pengeiuaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu

serta dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari pengguna dana dan pertanggung jawaban kepada publik.

Mardiasmo (2009: 63) menjelaskan bahwa anggaran penting karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan trade offs.
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan mengenai realisasi anggaran yaitu menyangkut pelaporan tentang penggunaan anggaran dalam periode anggaran apakah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam pencapaian target kinerja yang telah disepakati bersama. Siregar (2017:117) berpendapat, laporan realisasi anggaran adalah laporan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima dan dikeluarkan untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komperatif. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan ketaatan pada APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Mardiasmo (2009: 63) menjelaskan bahwa anggaran mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan (*planning tool*)
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian (*control tool*)
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*)
- d. Anggaran sebagai alat politik (*political tool*)
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*)
- f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*)
- g. Anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*)
- h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang public (*public sphere*)

Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan *outcomes* sedangkan hasil yang dicapai merupakan *output*. Efektivitas menurut Mardiasmo (2009:132) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Bastian Indra (2009: 78) menjelaskan bahwa efektifitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas hanya berbicara masalah *outputs* saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Mahmudi (2018: 86) menjelaskan bahwa efektifitas terkait dengan hubingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Teknik Pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara dan Studi Pustaka. Teknik Penentuan Informan menggunakan

Purposive Sampling dengan jumlah Informan sebanyak 3 orang. Teknik analisis data dalam penelitian terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Anggaran Pada Suku Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017 - 2019

Pelaksanaan anggaran adalah proses bagaimana melaksanakan atau merealisasikan apa yang sudah direncanakan dalam dokumen perencanaan anggaran. Pada dasarnya pelaksanaan anggaran pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat telah mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 dan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Namun penerapan anggaran yang berbasis kinerja atau yang berorientasi pada hasil, masih kurang. Dimana dalam pelaksanaannya, belanja harus dilaksanakan sesuai dengan rincian objek belanja yang ditetapkan. Apabila yang akan dibelanjakan berbeda dengan rincian objek dapat dilakukan mekanisme pergeseran anggaran. Bila dikaitkan dengan persyaratan penerapan *performance based budgeting* yaitu klasifikasi pengeluaran ditetapkan berdasarkan program (*program based*), artinya rincian belanja dalam suatu program atau kegiatan hanya bersifat informasi saja dan tidak mengikat sehingga Pelaksanaan belanja menjadi lebih fleksibel dan pengguna anggaran (*executive agencies*) tidak terikat dengan rincian belanja. Dengan demikian, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagian masih menggunakan pendekatan *line item budgeting* dimana anggaran menyajikan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan input atau sumber daya yang digunakan. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi yaitu menyangkut : a) Standar Pelayanan Minimal dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA yang seharusnya menjadi acuan awal dalam menentukan kinerja yang harus dihasilkan dan DPA Suku Badan Kesatuan Bangsa. Meskipun DPA sudah ada, tapi kadangkala dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya menjadi acuan. b) Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ). Capaian serapan anggaran di setiap tahun mengalami kenaikan capaian serapan anggaran atau penurunan sisa anggaran. Berikut akan penulis jelaskan setiap tahunnya.

- a. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.710.783.004,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat rupiah) yang terdiri dari belanja langsung untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdapat di Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017 yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 972/DPA/2017 tanggal 3 Januari 2017. Realisasi pelaksanaan anggaran Semester I (Satu) Tahun 2017 Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat sampai dengan Semester II (Dua) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.280.028.415,- atau 74,82% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja sebesar Rp 1.710.783.004,-. Dalam pelaksanaan/ penyerapan anggaran Tahun 2017 Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam hal ini mengalami kendala antara lain Pada saat pengajuan SPP dan SPM Ganti Uang (GU) hanya diberikan maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- padahal kebutuhan anggaran belanja lebih dari itu dan dapat mengajukan Ganti Uang (GU) kembali jika jurnal SPJ sudah mencapai 80%, tidak adanya dasar hukum untuk pemberian transport peserta, kegiatan cipta kondisi dalam rangka menciptakan Jakarta Pusat yang kondusif bersifat situasional, perbedaan spesifikasi harga sewa, pemeliharaan saat perencanaan dan pelaksanaan, pemberhentian/ pengunduran diri anggota Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, penyediaan makanan dan minuman rapat akibat intensitas rapat berkurang, pergeseran pelaksanaan kegiatan serta efisiensi yang berdampak pada serapan anggaran dalam DPA Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

- Administrasi Jakarta Pusat.
- b. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.432.931.437,- (*tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dan mengalami perubahan di APBD-P Tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 3.400.824.739,- (*tiga milyar empat ratus juta delapan ratus dua empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah*) yang terdiri dari belanja langsung untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdapat di Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018 yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 972/DPA/2018 tanggal 2 Januari 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 972/DPPA/2018 tanggal 18 Oktober 2018. Realisasi pelaksanaan anggaran semester I sampai dengan semester II Tahun 2018 Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp. 2.993.361.942,- atau 88,02% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja sebesar Rp. 3.400.824.739,-. Penyerapan belanja langsung Tahun 2018 Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat hampir sesuai rencana dikarenakan masih ada anggaran yang masih belum maksimal terserap terkait dengan kegiatan penyediaan makanan dan minuman akibat berkurangnya intensitas rapat (sesuai kebutuhan), Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus dan Pemeliharaan KDO akibat belum adanya mutasi aset KDO dari Bakesbangpol DKI Jakarta ke Suban Kesbangpol wilayah Kota, Pelaksanaan Cipta Kondisi Dalam Rangka Meningkatkan Jakarta yang kondusif akibat pengajuan perubahan di APBD-P 2018, pemberhentian/pengunduran diri anggota Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, adanya pergeseran jadwal di Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial serta efisiensi sewa tempat dan sewa bus kegiatan.
 - c. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 5.694.856.215,- (*lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah*) yang terdiri dari belanja langsung untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdapat di Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2019 yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 972/DPA/2019 tanggal 31 Desember 2018. Realisasi pelaksanaan anggaran semester I sampai dengan semester II Tahun 2019 Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp. 5.552.104.225,- atau 97,49% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja sebesar Rp. 5.694.856.215,-. Penyerapan belanja langsung Tahun 2019 Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat hampir sesuai rencana dikarenakan masih ada anggaran yang masih belum maksimal terserap terkait dengan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat akibat berkurangnya intensitas rapat (sesuai kebutuhan), Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy dimana saat perencanaan anggaran menggunakan spesifikasi harga sewa tahun 2018 sedangkan harga sewa tahun 2019 berubah lebih tinggi, yang berakibat tidak terserapnya anggaran secara maksimal, pemberhentian /pengunduran diri anggota Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta efisiensi sewa tempat dan sewa bus kegiatan.

Hambatan-Hambatan yang dihadapi dan dinilai Perlu diatasi pada Lima Tahun yang Akan Datang

Terdapat berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat, dimana diketahui bahwa terjadinya penurunan efektivitas pelaksanaan sebagian besar dikarenakan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang berkompeten, kekurangan sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sehingga perlu direncanakan dengan baik pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya. Jika dihubungkan dengan penelitian sebelumnya terdapat persamaan bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan anggaran adalah faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan lebih mampu mengelola anggaran

dengan baik, begitupun dengan dukungan sarana dan prasarana. Untuk itu segala hambatan yang terjadi diharapkan dapat dihilangkan/ diminimalkan pada pengelolaan anggaran diperiode berikutnya.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Anggaran

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas anggaran yaitu penerapan manajemen berbasis kinerja; pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa; peningkatan kesadaran anti korupsi; peningkatan kemampuan teknis aparatur; penanganan pengaduan masyarakat melalui *system Citizen Relation Management*(CRM); mengoptimalkan partisipasi masyarakat (*civil society*); melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara; membuat penetapan kinerja secara berjenjang; meningkatkan kualitas pelayanan publik; menerapkan kesederhanaan serta penghematan; konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; menerapkan prinsip pemerintahan elektronik atau *e-government*.

Dari berbagai upaya yang dilakukan diketahui bahwa sudah menunjukkan hasil yang baik, atau dengan kata lain pengelolaan anggaran sudah cukup efektif. Hal ini sesuai dengan persentase capaian serapan anggaran Tahun 2017-2019 yang diketahui terdapat peningkatan persentase capaian serapan anggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam Mendukung *Good PublicdanGood Governances* sudah memperlihatkan efektivitas pelaksanaan anggaran yang efektif, dan diharapkan terus meningkat untuk tahun berikutnya

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada dasarnya pelaksanaan anggaran pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat telah mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 dan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Namun penerapan anggaran yang berbasis kinerja atau yang berorientasi pada hasil, masih kurang. Dari hasil pengamatan bahwa meskipun sudah ada Peraturan Gubernur tentang Standar Belanja, namun dalam pelaksanaannya masih ada belanja yang tidak sesuai dengan Analisis Standar Belanja
2. Terdapat berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hambatan internal yaitu terjadinya penurunan efektivitas pelaksanaan, sebagian besar dikarenakan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang berkompeten, dimana sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Selain itu terdapat hambatan lain yaitu kekurangan sumber daya manusia, dan juga sarana dan prasarana yang kurang memadai. Adapun hambatan eksternal yaitu intoleransi; lunturnya rasa cinta tanah air, lemahnya implementasi nilai-nilai pancasila; kuatnya arus globalisasi; fanatisme kedaerahan; kesenjangan sosial dan keadilan; kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan; masih kurangnya koordinasi antar pelaku pembangunan; pembinaan ormas belum optimal; kesadaran ormas untuk mendaftar; masih maraknya peredaran narkoba, premanisme, radikalisme, terorisme, tawuran pelajar dan tawuran antar warga/ kelompok; kurangnya keterlibatan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini; kesenjangan sosial; kurangnya lapangan pekerjaan; fanatisme kedaerahan/ primodialisme; dan masih kurangnya partisipasi politik masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas anggaran yaitu penerapan manajemen berbasis kinerja pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa; peningkatan kesadaran anti korupsi; peningkatan kemampuan teknis aparatur; penanganan pengaduan masyarakat melalui *system Citizen Relation Management*(CRM); mengoptimalkan partisipasi masyarakat (*civil society*); melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara; membuat penetapan kinerja secara berjenjang; meningkatkan kualitas pelayanan publik; menerapkan kesederhanaan serta penghematan; konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan; penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; menerapkan prinsip pemerintahan elektronik atau *e-government*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka masukan atau saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Efektifitas pelaksanaan anggaran dapat dikatakan mengalami perbedaan capaian serapan pada masing-masing tahun yang disebabkan oleh beberapa masalah. Dengan adanya masalah tersebut maka disarankan kepada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu dengan cara terus memperbaiki kinerja terutama dalam bidang pengelolaan anggaran.
2. Salah satu hambatan dalam efektivitas anggaran adalah faktor sumber daya manusia yang kurang berkompeten, dimana sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya diadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya para pegawai yang berada di posisi sebagai pengelola anggaran. Pelatihan bisa dilakukan secara periodik agar pegawai dapat terus meningkatkan kemampuannya dalam mendukung efektivitas anggaran.
3. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas anggaran, sebaiknya dilakukan evaluasi upaya apa saja yang betul-betul dapat memperlihatkan peningkatan efektivitas anggaran, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap target dan realisasi anggaran terhadap upaya yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2009. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Deddi dan Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Fadli HS, Ahmad. 2002. *Organisasi dan Administrasi*. Cet. III, Kediri: Manhalun Nasiin Press.
- Halim, A. dan Iqbal, M. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harun. 2008. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Jakarta: Mandar Maju.
- Ihyaul, Ulum, 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Bumi Askara.
- Mahmudi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Mashun, M et al. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong Lexsi. 2015. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Soewarno Handayani. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sondang P. Siagian. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tamasoleng, Adelstin. 2015. *Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol. 3, No.1, P: 97-110 (Universitas SaRatulangi).

Wiratna. 2015. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.